



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018**

KEBUMEN, 23 JANUARI 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai evaluasi dan penilaian atas perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Di samping itu, laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Penyusunan LKjIP mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, berisi pengukuran capaian perjanjian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana kinerja tahunan dan rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tahun 2018 menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan program/kegiatan pada tahun-tahun yang berikutnya.

Kebumen, 23 Januari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN

H. EDI RIAN TO, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19701101 199803 1 006

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi	2
2. Sumber daya manusia	2
3. Sarana dan Prasarana.....	4
4. Anggaran.....	5
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKJIP.....	5
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	8
3. Program dan Kegiatan.....	10
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018.....	11
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	15
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	32
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2018.....	34
D. INOVASI YANG DILAKSANAKAN	39
BAB IV : PENUTUP.....	40
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
3. Penghargaan	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka harus dilakukan evaluasi dan pengukuran sebagai bentuk pertanggungjawaban public.

Pengukuran capaian kinerja dengan Skala ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2018, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	50,00
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,00
		Capaian luas RTH perkotaan	16,93
		Indeks Kualitas Udara	77,00
		Indeks Kualitas Air	61,00
		Cakupan pelayanan sampah	42,74
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	97,66

Program yang dilaksanakan untuk mendukung target kinerja tersebut meliputi 15 program dan 53 kegiatan dengan sumber anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 39.870.986.000,- dan anggaran DAK sebesar Rp. 17.916.070.000,-.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2018 mencakup 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja, sebagai berikut :

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi	% Capaian	Target. Akhir RPJ-MD	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
I.	Sasaran 1.						
1	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	50,00	14,33	28,66	100,00	14,33
	Rata-rata % capaian Sasaran 1				28,66		
II	Sasaran 2.						
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin/Indeks	69,00	72,25	104,71	77,50	93,23
3	Luasan RTH Perkotaan	%	16,93	17,18	101,48	17,45	98,45
4	Indeks Kualitas Udara	%	77,00	87,83	114,06	79,00	111,18
5	Indeks Kualitas Air	%	61,00	56,67	92,90	76,00	74,57
6	Cakupan pelayanan sampah	%	42,74	51,93	121,50	42,94	120,94
	Rata-rata % capaian Sasaran 2				106,93		
III.	Sasaran 3						
7	Cakupan Rumah Layak Huni	%	97,66	97,67	100,01	100,00	97,67
	Rata-rata % capaian Sasaran 3				100,01		

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) indicator tersebut, menunjukkan bahwa 5 (lima) indicator dapat tercapai sesuai target, 2 (dua) indicator belum dapat tercapai sesuai target. Prosentase capaian untuk sasaran 1 dengan 1 (satu) indicator sebesar 28,66% (kategori “Kurang”), untuk sasaran 2 dengan 5 (lima) indicator rata-rata capaian sebesar 106,93% (kategori “Baik Sekali”), sedangkan untuk sasaran 3 dengan 1 (satu) indicator dengan prosentase capaian sebesar 100,01 (kategori “Baik Sekali”).

SASARAN	JUMLAH	PENCAPAIAN INDIKATOR			
	INDIKATOR	BS	B	C	K
1	1	-	-	-	1
2	5	4	1	-	-
3	1	1	-	-	-

1. Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah.
 - 1.1. Indikator : Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 50% baru dicapai 14,33% (% capaian 28,66% atau kategori “Kurang”).

Faktor penghambat belum tercapainya target penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kebumen terutama disebabkan untuk penanganan kawasan kumuh seluas 213,622 Ha, memerlukan anggaran relatif besar yang dibagi berdasarkan kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2018 dari 213,622 Ha baru tertangani 30,61 ha (14,33%), dimana alokasi anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat belum sesuai dengan rencana. Di samping itu, untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah desa masih terkendala dengan permasalahan asset.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
 - 2.1. Indikator 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator ini sudah dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 69,00 realisasi 72,25% (% capaian 104,71% atau kategori “Baik Sekali”).

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indicator kinerja terutama dengan melaksanakan berbagai program yang mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama air dan udara, dengan sasaran peningkatan sarana prasarana, pemantauan lingkungan secara kontinyu, pelayanan pengolahan air limbah domestik, pembangunan ruang terbuka hijau, pelayanan persampahan, kegiatan car free day, serta penyuluhan kepada masyarakat.
 - 2.2. Indikator 2 : Capaian Luas RTH Perkotaan.

Indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 16,93% realisasi 17,18 (% capaian 101,48% atau kategori “Baik Sekali”).

Capaian luas RTH perkotaan tahun 2018 melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas dan pemeliharaan sarana prasarana RTH di wilayah perkotaan (terutama Kebumen, Prembun, Karanganyar dan Gombong). Beberapa permasalahan yang terkait dengan ruang terbuka hijau terutama masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta memelihara RTH.
 - 2.3. Indikator 3 : Indeks Kualitas Udara.

Indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target, dari target 77% realisasi dicapai 87,83% (% capaian 114,06% atau kategori “Baik Sekali”).

Beberapa factor pendorong keberhasilan indicator ini antara lain keberadaan ruang terbuka hijau dan tutupan hutan yang sangat menunjang kualitas udara di Kabupaten Kebumen, di samping keberhasilan program yang dilaksanakan dalam

rangka pengendalian polusi dan pencemaran udara (sosialisasi/penyuluhan, car free day, dll).

2.4. Indikator 4 : Indeks Kualitas Air.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 61% baru dicapai 56,67% (% capaian 92,90% atau kategori “Baik”).

Faktor penghambat belum tercapainya indicator ini terutama disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestic disebabkan budaya BAB sembarangan serta oleh limbah industry.

2.5. Indikator 5 : Cakupan Pelayanan Sampah.

Indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 42,74% realisasi 51,93% (% capaian 28,60% atau kategori “Kurang”).

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indicator ini yaitu dengan semakin meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama penambahan armada, peningkatan fasilitas TPA (timbangan) dan penambahan rute angkutan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja cakupan pelayanan sampah antara lain produksi sampah semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, di samping kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pengelolaan sampah yang benar (budaya buang sampah sembarangan, pengolahan sampah rumah tangga masih terbatas).

3. Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

3.1. Indikator : Cakupan Rumah Layak Huni.

Indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 97,66% realisasi 97,67% (% capaian 100,01% atau kategori “Baik Sekali”).

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indicator ini terutama adanya dukungan pembiayaan baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta maupun dukungan swadaya masyarakat.

4. Akuntabilitas kinerja keuangan.

Dari total anggaran sebesar Rp. 48.939.459.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.114.234.593,- (88,10%), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	9.068.473.000	8.881.674.843	97,94
2	Belanja Langsung	39.870.986.000	34.232.559.750	85,86
	Total	48.939.459.000	43.114.234.593	88,10

Dalam hal ini terdapat penghematan masing-masing untuk belanja tidak langsung terdapat penghematan sebesar 12,06%, sedangkan

untuk belanja langsung penghematan sebesar 14,14% berasal dari efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

Untuk anggaran yang bersumber dari DAK, dari total anggaran sebesar Rp. 17.916.070.000,-, realisasi sebesar Rp.16.970.272.050 (94,72%), atau penghematan sebesar 5,28%.

5. Evaluasi Kinerja.

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan evaluasi secara berkala dalam rapat-rapat melalui :

- Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan/ Kegiatan (triwulanan), untuk triwulan 1 dilaksanakan pada bulan April 2018, triwulan 2 pada bulan Agustus 2018, triwulan 3 pada bulan Oktober 2018 dan untuk triwulan 4 pada awal Desember 2018.
- Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan rencana kerja secara triwulanan, untuk triwulan 1 dilaksanakan pada bulan April 2018, triwulan 2 pada bulan Agustus 2018, triwulan 3 pada bulan Oktober 2018 dan untuk triwulan 4 pada awal Januari 2019.

6. Upaya yang dilakukan dan tindak lanjut.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja tahun 2018 terutama dengan melaksanakan berbagai program yang menunjang capaian kinerja meliputi program urusan perumahan dan permukiman dan urusan lingkungan hidup.

Terhadap indikator kinerja yang belum dapat dicapai yaitu “prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan” dan “indeks kualitas udara”, tindak lanjut berupa :

- Perencanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya dengan melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangannya.
- Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan pelayanan pengolahan air limbah domestic, serta kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama pencemaran air.

7. Penghargaan yang diperoleh.

Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja di bidang lingkungan hidup yang telah dicapai pada tahun 2018, telah diberikan penghargaan kepada Kabupaten Kebumen berupa “Sertifikat Adipura” dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sebagai entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban menyusun laporan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja selama satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang digunakan untuk mencapai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dalam laporan kinerja ini mencakup evaluasi dan pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja dan akuntabilitas keuangan serta identifikasi factor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target maupun kendala dan permasalahan apabila target tidak dapat dicapai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah antara lain ::

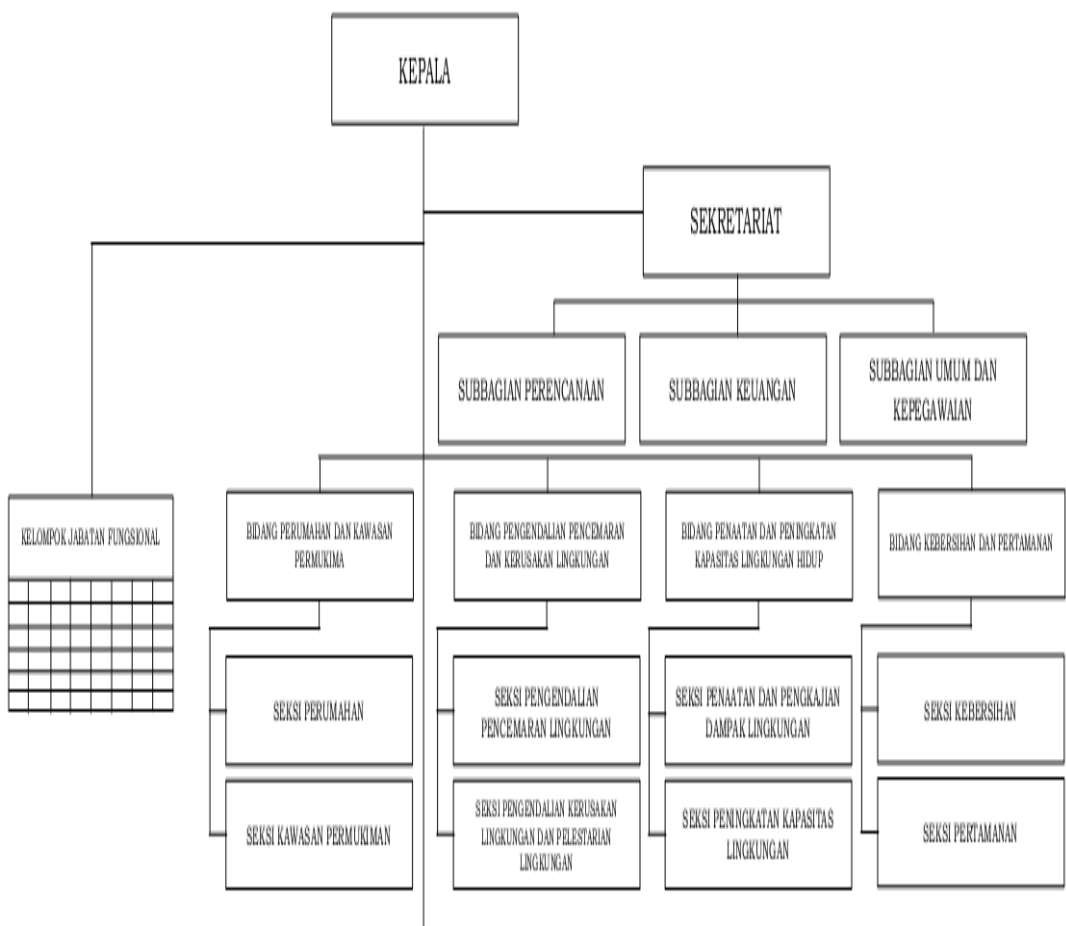
1. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen atas pelaksanaan kinerjanya.
2. Untuk mengetahui ketercapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kabumen Tahun 2016-2021
3. Untuk mengukur Keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah dicapai dalam tahun 2018

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.

Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya

2. Sumber Daya Manusia.

Sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2018, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai Negeri	125
2.	Kualifikasi Pendidikan	
	- SD/MI	32
	- SLTP/MTS	29
	- SMA/MA	39
	- Diploma I, II & III	5
	- Diploma IV / S 1	10
	- Pasca Sarjana	10
3.	Pangkat dan Golongan	
	- Golongan I	36
	- Golongan II	59
	- Golongan III	23
	- Golongan IV	7
4.	Pejabat Struktural	17
	- Esselon II	1
	- Esselon III	5
	- Eselon IV	11

Salah satu urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang memerlukan dukungan personil yang cukup banyak yaitu pada Bidang Pertamanan dan Kebersihan serta Bidang Perumahan, sehingga dengan keterbatasan jumlah PNS yang ada harus didukung oleh tenaga non PNS (PTT dan tenaga harian lepas).

3. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen selain didukung oleh Sumber Daya Manusia berupa personil/pegawai juga didukung dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasana yang dimiliki sebagaimana tabel berikut :

No.	Kelompok Barang	Jumlah
1	Alat-alat Besar	14
2	Alat-alat Angkutan	153
3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	10
4	Alat-alat pertanian/peternakan	7
5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	833
6	Alat-alat studio dan komunikasi	21
7	Alat-alat laboratorium	199
8	Bangunan Gedung	3

Sarana prasarana yang masih membutuhkan penambahan berupa alat-alat kantor terutama alat pengolahan data (laptop dan printer), di samping dari segi jumlah masih mengalami kekurangan, juga untuk mengganti peralatan yang mengalami kerusakan disebabkan umur pakai.

4. Anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, pada tahun anggaran 2018 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 48.939.459.000, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji PNS) sebesar Rp. 9.068.473.000 dan Belanja Langsung (program/kegiatan) sebesar Rp. 39.870.986.000,-. Di samping itu didukung dengan anggaran DAK sebesar Rp. 17.916.070.000,- (bidang perumahan, bidang sanitasi dan bidang lingkungan hidup).

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2018, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi dan sistematika penyusunan LKjIP.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini menguraikan tentang rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2018.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja tahun 2018 dan evaluasi, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Tahun 2018.

BAB IV: PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Dan Misi

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Dalam rangkapencapaian visi dimaksud, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

Misi ke-1 : Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

Misi ke-2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

Misi ke-3 : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;

- Misi ke-4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
- Misi ke-5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- Misi ke-6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama

Dari enam misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 3, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi organisasi. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten kebumen untuk tahun 2016-2021, dikaitkan dengan visi dan misi Bupati, sebagaimana tabel berikut :

Misi 3 : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Persentase peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Indeks kualitas lingkungan	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup
			Capaian luas RTH perkotaan
			Angka indeks kualitas udara
			Angka indeks kualitas air
			Cakupan pelayanan sampah
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni
Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu			

menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD

3. Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen meliputi 15 program dan 53 kegiatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

No.	Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	14
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6
3	Program Pengembangan Data/Informasi	1
4	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	1
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4
6	Program Pengembangan Perumahan	2
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1
8	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9
9	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1
10	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	1
11	Program peningkatan kualitas dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	3
12	Program pengelolaan areal pemakaman	3
13	Program peningkatan pengendalian polusi	2
14	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3
15	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	2

Di samping alokasi program yang bersumber dari DAK melputi

DAK Bidang Perumahan (1 kegiatan), DAK Bidang Sanitasi (1 kegiatan), DAK Bidang Lingkungan Hidup (1 kegiatan).

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018.

Rencana kinerja tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021 dalam bentuk rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Pagu
		Rp
I.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.980.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	143.237.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.000.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.726.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	33.000.000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.395.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.411.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	41.695.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	53.900.000
13	Penunjang Administrasi Perkantoran	573.343.000
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	65.000.000
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	48.000.000
17	Pengadaan mebeleur	22.000.000
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	36.000.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	129.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.500.000
III.	Program Pengembangan Data/Informasi	
21	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	67.000.000

No.	Program/Kegiatan	Pagu
		Rp
IV.	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	
22	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	14.000.000
23	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	8.960.000.000
V.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
24	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	4.569.246.000
25	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	100.000.000
26	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1.539.000.000
VI.	Program Pengembangan Perumahan	
27	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1.328.710.000
28	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah sederhana sehat	418.000.000
VII.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
29	Penanganan kawasan kumuh perkotaan	3.477.382.000
VIII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
30	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	203.365.000
31	Pemantauan Kualitas Lingkungan	330.000.000
32	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	105.000.000
33	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	60.000.000
34	Pengkajian dampak lingkungan	90.000.000
35	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	150.000.000
36	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	300.000.000
37	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	200.000.000
38	Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)	125.000.000
IX	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	
39	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	100.000.000
X	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	
40	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	2.500.000.000
XI	Program peningkatan kualitas dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	
41	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	60.000.000
42	Pengembangan data dan informasi lingkungan	40.000.000
43	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	200.000.000
XII	Program pengelolaan areal pemakaman	
44	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman	60.000.000

No.	Program/Kegiatan	Pagu
		Rp
45	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1.000.000.000
46	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	100.000.000
XIII	Program peningkatan pengendalian polusi	
47	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	1.594.000
48	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	70.000.000
XIV	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
49	Penyusunan program pengembangan RTH	100.000.000
50	Penataan RTH	6.545.502.000
51	Pemeliharaan RTH	3.565.000.000
XV	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
52	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	2.050.000.000
53	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Limbah	60.000.000
	TOTAL	39.870.986.000

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2018 antara Bupati dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sebaga berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	50
2	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup	69
		Capaian luas RTH perkotaan	16,93

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
		Angka indeks kualitas udara	77
		Angka indeks kualitas air	61
		Cakupan pelayanan sampah	42,74
3	Meningkatnya keber- dayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	97,66

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka harus dilakukan evaluasi dan pengukuran sebagai bentuk pertanggungjawaban public.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indicator kinerja sasaran digunakan Skala pengukuran ordinal sebagaimana tabel berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2018, mencakup tiga sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah, (2) meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dan

(3) meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Secara rinci capaian kinerja tahun 2018 untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1, “Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah”, dengan indikator “prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan”.

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 7 indikator yaitu penataan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum dan proteksi kebakaran.

Luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 213,622 Ha, meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kec. Gombang (2 kelurahan), Kec. Karanganyar (2 kelurahan dan 1 desa), Kec. Kebumen (5 kelurahan dan 3 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa), Kec. Prembun (4 desa).

Rincian lokasi penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2018, sebagaimana tabel berikut :

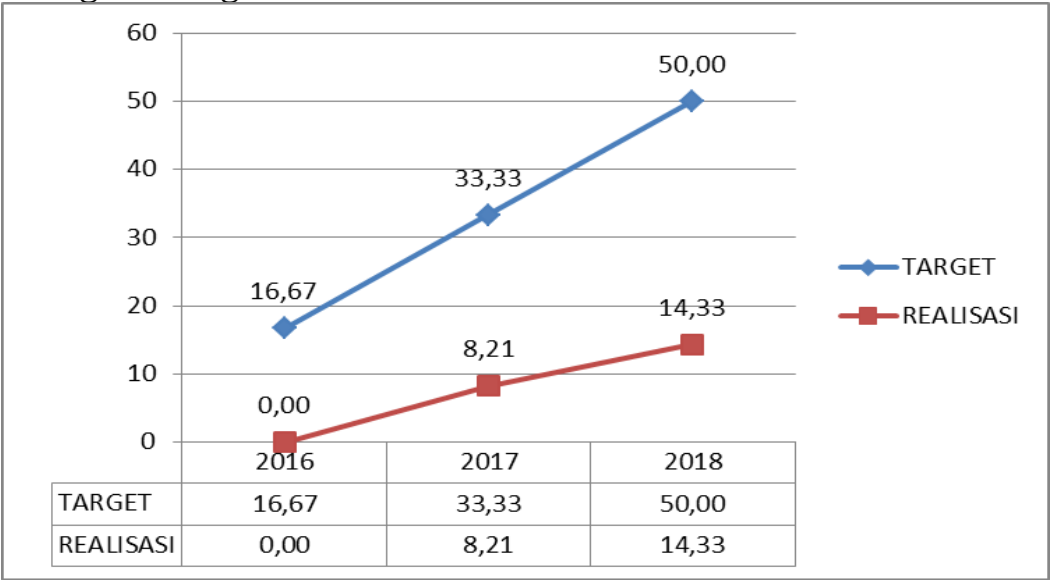
No.	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Penanganan (Ha)				Ket
			2017	2018	Jumlah	%	
1	2	3	5	8		9	
I.	Kewenangan Kabupaten						
1	Kelurahan Gombang	14,52	6,09	1,44	7,53	51,86	
2	Kelurahan Wonokriyo	2,20	0,35	1,32	1,67	75,79	
3	Kelurahan Plarangan	4,35	1,48	2,87	4,35	100	
4	Kelurahan Karanganyar	0,51	-	0,51	0,51	100	
5	Desa Candi	10,65	1,33	1,68	3,01	28,29	
6	Kelurahan Panjer	11,00	2,59	-	2,59	23,55	
7	Desa Kawedusan	0,09	0,09	-	0,09	100	
8	Kelurahan Bumirejo	5,28	2,26	-	2,26	42,82	
9	Desa Kutosari	5,42	2,19	-	2,19	40,42	
10	Kelurahan Selang	5,30	0,66	4,30	4,95	93,52	
11	Kelurahan Tamanwinangun	0,96	-	0,96	0,96	100	
12	Kelurahan Kebumen	9,04	0,50	-	0,50	5,52	
13	Desa Gemeksekti	0,27	-	-	-	-	

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Penanganan (Ha)				Ket
			2017	2018	Jumlah	%	
		69,57	17,53	13,08	30,61	43,99	
II.	Kewenangan Pusat dan Provinsi						
14	Desa Kuwarisan	7,41	-	-	-	-	
15	Desa Kutowinangun	26,32	-	-	-	-	
16	Desa Lundong	6,34	-	-	-	-	
17	Desa Mekarsari	11,65	-	-	-	-	
18	Desa Tersobo	24,47	-	-	-	-	
19	Desa Prembun	32,71	-	-	-	-	
20	Desa Bagung	6,39	-	-	-	-	
21	Desa Kabekelan	28,76	-	-	-	-	
		144,05	-	-	-	-	
	Total	213,62	17,53	13,08	30,61	14,33	

Pencapaian kinerja prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Target. Akhir RPJ- MD	% Capaian trhdp Target Akhir RPJ- MD
1	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	50,00	14,33	28,66	100,00	14,33

Perbandingan capaian tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagaimana grafik berikut :



Rendahnya prosentase capaian penanganan kawasan kumuh, terutama disebabkan anggaran penanganan kawasan kumuh membutuhkan anggaran yang relative besar dengan pembagian

kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sampai saat ini alokasi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat belum sesuai dengan rencana, di samping itu untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah desa masih terkendala dengan permasalahan asset.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi (APBD provinsi) dan pusat (APBN dan DAK).

Untuk penanganan kawasan kumuh tahun 2018 didukung dengan program lingkungan sehat perumahan pada kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 3.477.382.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.883.061.698,- (82,91%). Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 17,09% berasal dari belanja barang/jasa dan belanja modal kegiatan penanganan kawasan kumuh.

Di samping itu, didukung dengan alokasi anggaran DAK sebesar Rp.6.629.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.629.000.000 (100%).

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya yaitu dengan merencanakan program/kegiatan dan melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangannya.

2. Sasaran 2, “Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam”

a. Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- Untuk memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan

- evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Daerah mencakup dua parameter dengan formulasi :

$$\text{Indeks Kualitas Udara} + \text{Indeks Kualitas Air Sungai}$$

2

(untuk Indeks Tutupan Hutan tidak digunakan dikarenakan urusan kehutanan menjadi urusan pemerintah provinsi. Adapun hasil capaian IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2018 dengan menggunakan 2 parameter dimaksud sebagai berikut :

$$\frac{\text{Indeks Kualitas Udara } 87,83 + \text{Indeks Kualitas Air } 56,67}{2} = 72,25$$

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,67	69	72,25	104,71%	77,5	93,23%

Dari target IKLH yang ditetapkan Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 sebesar 69% realisasi mencapai 72,25% (prosentase capaian sebesar 104,71 %).

Berdasarkan klasifikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka tersebut kategori “Baik”, sebagaimana table berikut :

Rentang	Klasifikasi
IKLH > 80	Sangat Baik
70 < IKLH ≤ 80	Baik
60 < IKLH ≤ 70	Cukup Baik
50 ≤ IKLH ≤ 60	Kurang Baik
40 ≤ IKLH > 50	Sangat Kurang Baik
30 ≤ IKLH > 40	Waspada

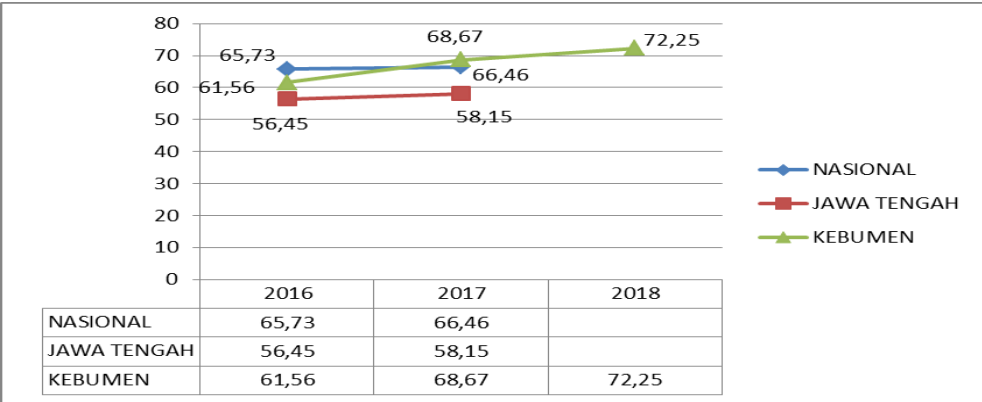
Rentang Status IKLH (Sumber Buku IKLH Nasional 2016)

Adapun apabila penghitungan IKLH mengacu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 3 parameter,

didapat hasil sebagai berikut :

No.	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil (Nilai X bobot)
1	Indeks Kualitas Air	56,67	30	17,00
2	Indeks Kualitas Udara	87,83	30	26,35
3	Indek Tutupan hutan/vegetasi	70,66	40	28,26
IKLH				71,61

Perbandingan capaian kinerja IKLH Kabupaten Kebumen dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut :



Data capaian IKLH tahun 2018 untuk nasional dan provinsi belum dapat disandingkan.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indicator kinerja terutama dengan melaksanakan berbagai program yang mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama air dan udara, dengan sasaran peningkatan sarana prasarana, pemantauan lingkungan secara kontinyu, pelayanan pengolahan air limbah domestik, pembangunan ruang terbuka hijau, pelayanan persampahan, kegiatan car free day, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018 juga masih sangat didukung oleh capaian Angka Indeks Kualitas Udara sebagai salah satu parameter dalam penghitungan IKLH, dimana kondisi udara di Kabupaten Kebumen masih sangat baik, capaian Angka Indeks Kualitas Udara pada tahun 2018 berdasarkan passive sampler yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK mencapai 87,83% dari target 77% (114,09% dari target).

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak terdapat hambatan atau tantangan dalam mencapai target, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hal tersebut diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestik disebabkan budaya BAB sembarangan serta oleh limbah industry. Dari hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen, beberapa parameter masih diatas baku mutu. Demikian juga dengan kualitas udara berpotensi mengalami penurunan seiring dengan semakin tingginya aktifitas ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah moda transportasi.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2019 maupun untuk mencapai target akhir RPJMD terutama dengan melanjutkan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelestarian lingkungan hidup, baik berupa pembangunan sarana prasarana maupun peningkatan peranserta masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan secara berkala kepada masyarakat. Di samping itu dalam rangka pengendalian pencemaran udara, diupayakan dengan penambahan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta pengendalian polusi udara (car free day, dll).

Pada tahun 2018 indikator ini didukung oleh program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program pengelolaan areal pemakaman, program peningkatan pengendalian polusi, program pengelolaan ruang terbuka hijau, dengan total anggaran sebesar Rp. 31.073.707.000 dan realisasi sebesar Rp.26.472.973.887 (85,19%).

Dalam hal ini terjadi penghematan penggunaan anggaran sebesar 14,81% yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

b. Capaian luas RTH perkotaan.

RTH merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota yang

memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologis, terutama sebagai penghasil oksigen dan sebagai kawasan resapan air. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan luas RTH minimal yang harus disediakan oleh suatu kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah (20% RTH Publik dan 10% RTH Private).
 Formulasi penghitungan capaian luas RTH perkotaan sebagai berikut :

Luas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Ha)

----- X 100%

Luas wilayah perkotaan (Ha)

Pencapaian kinerja Capaian Luas RTH Perkotaan Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

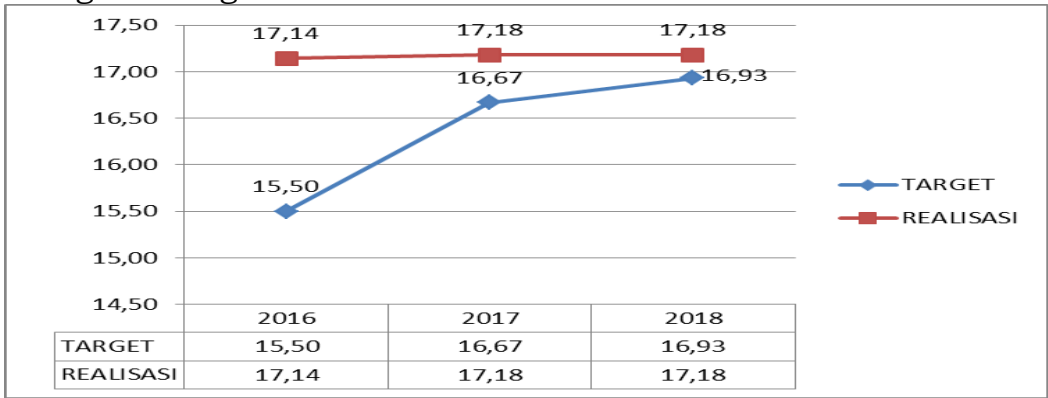
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Target. Akhir RPJ-MD	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
1	Capaian luas RTH perkotaan	%	16,93	17,18	101,48	17,45	98,45

Secara rinci data capaian RTH perkotaan tahun 2018 sebagaimana table berikut :

NO	WILAYAH	LUAS KAWAS-AN PERKO-TAAN/ HPL (Ha)	RTH_EKSIS-TING	LUAS (Ha)	CAPAI-AN (%)
1	Gombong	1785,81	Lapangan Makam Sempadan KA Sempadan Su-ngai	3,13 19,57 21,42 180,77	
2	Karanganyar	483,32	Lapangan Makam Sempadan KA Sempadan Su-ngai	224,89 3,08 9,12 7,17 61,40	12,59
3	Kebumen	1234,38	Alun-Alun Batas Kota Hutan Kota Lapangan Islam Center Makam Median Jalan Pasar Hewan Pulau Jalan	80,77 3,93 0,41 3,32 0,17 46,43 1,40 0,10 0,14	16,71

NO	WILAYAH	LUAS KAWAS-AN PERKO-TAAN/ HPL (Ha)	RTH_EKSIS-TING	LUAS (Ha)	CAPAI-AN (%)
4	Kutowina-ngun	455,33	Sempadan KA	18,21	
			Sempadan Sa-luran Induk	14,70	
			Sempadan Su-ngai	179,56	
			Stadion	3,77	
			Taman	5,57	
			Taman Jalan	2,35	
			Taman Parkir	1,29	
				281,35	
	Prembun	300,78	Lapangan	3,56	22,11
			Makam	15,89	
			Sempadan KA	3,54	
			Sempadan Su-ngai	77,68	
			100,67		
			0,48		
			Lapangan	0,48	
			Makam	9,10	
			Taman	0,82	
			Sempadan KA	2,54	
			Sempadan Su-ngai	31,37	
				44,31	
	TOTAL	4.259,62		731,99	17,18

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya sebagaimana grafik berikut :



Capaian luas RTH perkotaan tahun 2018 tidak terdapat penambahan luasan, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan masih prioritaskan untuk peningkatan kualitas RTH yang sudah ada dan untuk pemeliharaan sarana prasarana RTH di wilayah perkotaan (Kebumen, Pembun, Karanganyar dan Gombang). Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target akhir RPJMD, diupayakan dengan melakukan penambahan luasan RTH, di samping tetap melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang sudah dibangun.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2018 untuk mendukung indikator ini yaitu program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan program pengelolaan areal pemakaman dengan anggaran sebesar Rp. 11.370.502.000 dan realisasi Rp. 8.864.628.992 (77,96%). Terdapat penghematan sebesar 22,04% berasal dari efisiensi belanja pengadaan barang/jasa dan belanja modal.

c. Angka indeks kualitas udara.

Indeks kualitas udara merupakan bahasa yang informatif dan mudah dipergunakan untuk menjelaskan/ menginformasikan perubahan-perubahan kualitas udara suatu perkotaan. Pemantauan kualitas udara secara kontinyu di suatu perkotaan menjadi sangat penting guna mengetahui indikasi-indikasi adanya perubahan yang signifikan tentang kualitas udara dan guna masukan-masukan bagi perencanaan tentang udara bersih. Indeks kualitas udara di Kabupaten Kebumen dihitung berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO₂ dan NO₂, dengan formulasi sebagai berikut :

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

dimana:

IPU = Indeks Pencemaran Udara

IP_{NO₂} = Indeks Pencemar NO₂

IP_{SO₂} = Indeks Pencemar SO₂

Capaian indeks kualitas udara tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Target. Akhir RPJ-MD	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
1	Indeks Kualitas Udara	%	77	87,83	114,06	79,00	111,18

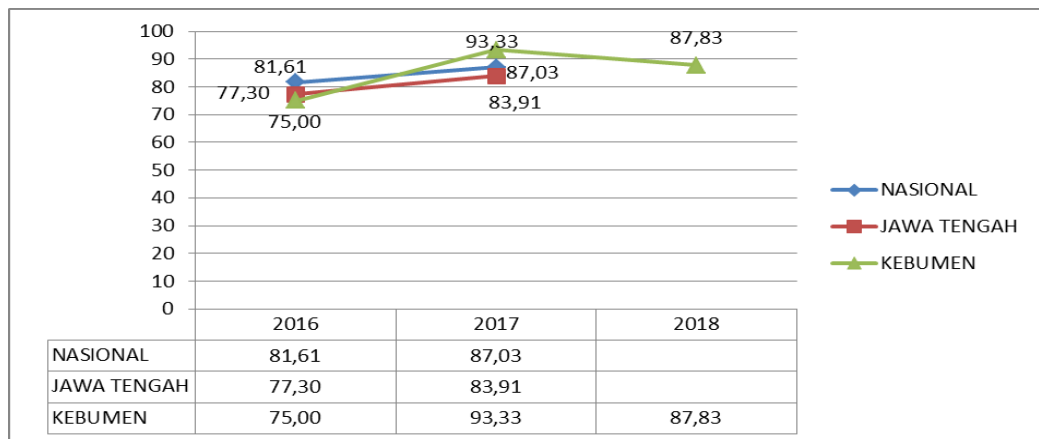
Rincian penghitungan rerata kualitas udara ambien Kabupaten Kebumen Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kabupaten Kebumen	SO2	NO2
1	Transportasi	10,22	18
2		8,66	20,4
3	Industri	3,82	9,7
4		3,68	9,5
5	Permukiman	6,65	7,5
6		5,56	8,2
7	Perkantoran	6,84	10,1
8		10,59	8,8
	Rerata	7,00	11,53

Sumber :Hasil Uji Passive Sampler Kementerian LHK tahun 2018

Angka indeks pencemaran udara di Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dengan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek negative bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi dapat berpengaruh terhadap lingkungan yang sensitive dan nilai estetika.

Perbandingan capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen beberapa tahun terakhir dengan capaian nasional maupun provinsi Jawa Tengah, sebagaimana grafik berikut :



Data capaian tahun 2018 untuk nasional dan provinsi belum dapat disandingkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi beberapa tahun lalu, capaian indeks kualitas udara di Kabupaten Kebumen masih lebih baik.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan mempertahankan agar indeks kualitas udara tidak mengalami penurunan seiring dengan semakin tingginya aktifitas ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah moda transportasi, dengan mengurangi perilaku negative masyarakat yang dapat mengurangi kualitas udara (kebiasaan membakar sampah, gas buang kendaraan diatas ambang batas, dll).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung indicator ini yaitu program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, program rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam, program

pengelolaan ruang terbuka hijau, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dengan anggaran sebesar Rp. 14.673.867.000 dan realisasi Rp. 11.951.717.861 (81,45%). Terdapat penghematan penggunaan anggaran sebesar 18,55% berasal dari efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

d. Angka indeks kualitas air.

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, sehingga kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks kualitas air sungai Kabupaten Kebumen dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Dissolved Oxygen* (DO), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), Total Fosfat, Total Coli dan Fecal Coli. Untuk parameter Fecal Coliform dan Total Coliform tidak dimasukkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Sungai yang rutin diukur meliputi sungai lukulo dan wawar, di lokasi hulu dan hilir selama musim kemarau dan penghujan.

Formulasi penghitungan angka Indeks Kualitas Air, sebagai berikut :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

dimana:
 (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij
 (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij

Capaian indeks kualitas air tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Target. Akhir RPJ-MD	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
1	Indeks Kualitas Air	%	61,00	56,67	92,90	76,00	74,57

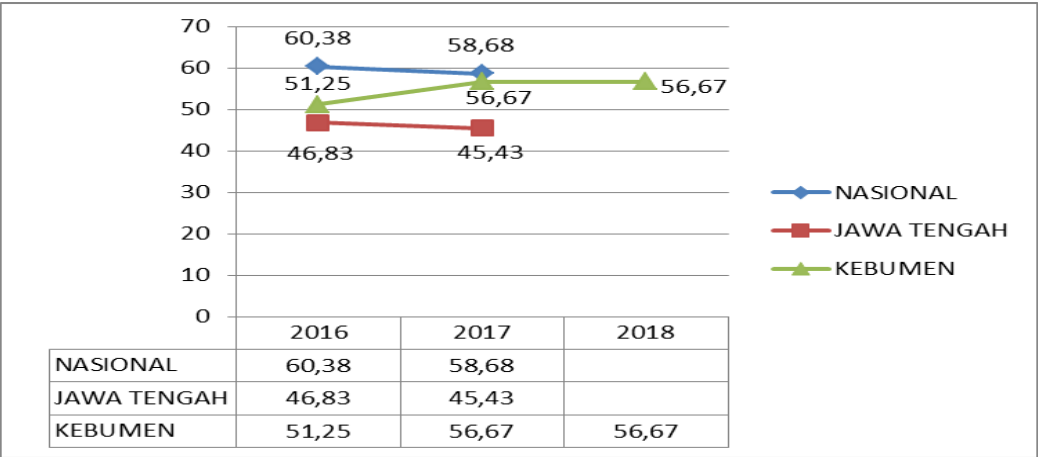
Rincian data hasil pengukuran kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Nama Sungai	Lokasi Koordinat	Periode/ Tanggal	HASIL UJI LABORATORIUM						BAKU MUTU LINGKUNGAN						PERHITUNGAN STATUS MUTU AIR														Status Mutu								
				TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total Coliform	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total Coliform	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total Coliform	(C/L)R	(C/L)M	(C/L)R2	(C/L)M2	Pi	Air								
1	Hulu Sungai Wawar	S = 07° 31' 21,7" E = 109° 41' 16,1"	m. Kening/ 13 Juli 2018	2,5	4,42	0,65	3	0,029	200	2000	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,05	0,38	0,83	0,12	0,12	0,20	0,40	0,05	0,38	(2,32)	(3,60)	0,12	0,20	0,40	(0,68)	0,40	0,47	0,16	0,58	memenuhi	
2	Tengah S. Wawar	S = 07° 31' 21,7" E = 109° 41' 16,1"		18	2,56	5	27	0,015	180	3200	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,36	(0,92)	6,00	1,08	0,08	0,18	0,64	0,36	(0,92)	2,11	1,17	0,08	0,18	0,64	0,52	2,11	0,27	4,45	1,54	ringan	
3	Hilir S. Wawar	S = 07° 34' 28,8" E = 109° 31' 38,7"		59	4	7	33	0,002	1580	5000	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,18	(4,33)	19,67	1,32	0,10	1,58	1,00	1,18	(4,33)	2,84	1,60	0,10	1,58	1,00	0,57	2,84	0,32	8,06	2,05	ringan	
4	Sungai Luk Ulo Hulu	S = 07° 36' 41,6" E = 109° 32' 41,7"		0,6	5,86	7	18	0,0095	286	318	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,01	0,53	0,20	0,72	0,05	0,29	0,06	0,01	0,53	2,84	0,29	0,05	0,29	0,06	0,58	2,84	0,34	8,06	2,05	ringan	
5	Sungai Luk Ulo Tengah	S = 07° 37' 41,8" E = 109° 41' 16,1"		4	6,63	2	15	0,0028	102	1220	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,08	0,25	1,33	0,60	0,14	0,10	0,24	0,08	0,25	0,12	(0,11)	0,14	0,10	0,24	0,12	0,25	0,01	0,06	0,20	memenuhi	
6	sungai Luk Ulo Hilir	S = 07° 38' 35,2" E = 109° 34' 45,8"		31	6,18	2	12	0,016	120	5600	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,62	(2,00)	10,33	0,48	0,08	0,12	1,12	0,62	(2,00)	0,12	(0,58)	0,08	0,12	1,12	(0,08)	1,12	0,01	1,25	0,79	memenuhi	
7	Hulu Sungai Wawar	S = 07° 43' 11,0" E = 109° 47' 16,4"	m. Penghujan 28 September 2018	0,038	7,26	7,49	23	0,329	46	36	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,00	0,58	0,01	0,92	1,65	0,05	0,01	0,00	0,58	2,99	0,82	1,65	0,05	0,01	0,87		2,99	0,76	8,92	2,20	ringan
8	Tengah S. Wawar	S = 07° 47' 28,9" E = 109° 48' 43,7"		62	5,5	3,7	9	0,331	2100	7000	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,24	(4,58)	20,67	0,36	1,66	2,10	1,40	1,24	(4,58)	1,46	(1,22)	1,66	2,10	1,40	0,29	2,10	0,09	4,41	1,50	ringan	
9	Hilir S. Wawar	S = 07° 48' 58,2" E = 109° 49' 52,0"		78	4	2	9	0,537	1200	6700	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,56	(5,92)	26,00	0,36	2,69	1,20	1,34	1,56	(5,92)	0,12	(1,22)	2,69	1,20	1,34	(0,03)	2,69	0,00	7,21	1,90	ringan	
10	Sungai Luk Ulo Hulu	S = 07° 43' 11,0" E = 109° 47' 16,4"		0,017	5	2,8	10	0,137	32	780	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,00	0,58	0,01	0,40	0,89	0,03	0,16	0,00	0,58	0,93	(0,98)	0,69	0,03	0,16	0,20	0,93	0,04	0,06	0,67	memenuhi	
11	Sungai Luk Ulo Tengah	S = 07° 47' 28,9" E = 109° 48' 43,7"		0,056	6,531	4,54	10	0,127	350	144	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,00	0,58	0,02	0,40	0,64	0,35	0,03	0,00	0,58	1,90	(0,98)	0,64	0,35	0,03	0,36	1,90	0,13	3,61	1,37	ringan	
12	sungai Luk Ulo Hilir	S = 07° 48' 58,2" E = 109° 49' 52,0"		0,038	7,26	7,49	23	0,158	46	36	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,00	0,58	0,01	0,92	0,79	0,05	0,01	0,00	0,58	2,99	0,82	0,79	0,05	0,01	0,75	2,99	0,56	8,92	2,18	ringan	
				Status		Jumlah										Persen				Koefisien				Nilai														
				Memenuhi		4										33%				70				23,33														
				Ringan		8										67%				50				33,33														
				Sedang		0										0%				30				0,00														
				Berat		0										0%				10				0,00														
						12																																
				Nilai Indeks Penc. Air																				56,67														

Sumber :Hasil Uji Laboratorium Lingkungan Dinas Perkim LH Kebumen, 2018

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa kualitas air sungai yang memenuhi Baku Mutu sebanyak 4 titik, Tercemar Ringan sebanyak 8 titik. tidak ada pencemaran dengan status sedang maupun berat.

Perbandingan capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen beberapa tahun terakhir dengan capaian nasional maupun provinsi Jawa Tengah, sebagaimana grafik berikut :



Data capaian tahun 2018 untuk nasional dan provinsi belum dapat disandingkan/ belum dipublikasikan.

Capaian indeks kualitas air tahun 2018 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hal tersebut diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestic disebabkan budaya BAB sembarangan serta oleh limbah industry. Dari hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen, beberapa parameter masih diatas baku mutu.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyediakan sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan air limbah domestic serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kualitas air dengan mengelola limbah sesuai dengan anjuran.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung indicator ini yaitu program pengendalian polusi, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan anggaran Rp. 6.244.959.000 dan realisasi Rp. 5.637.387.099 (90,27%). Dalam hal ini terdapat penghematan penggunaan anggaran sebesar 9,73% berasal efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

e. Cakupan pelayanan sampah.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah

meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Formulasi penghitungan cakupan pelayanan sampah sebagai berikut :

Jumlah sampah yg tertangani

Jumlah produksi sampah

X 100%

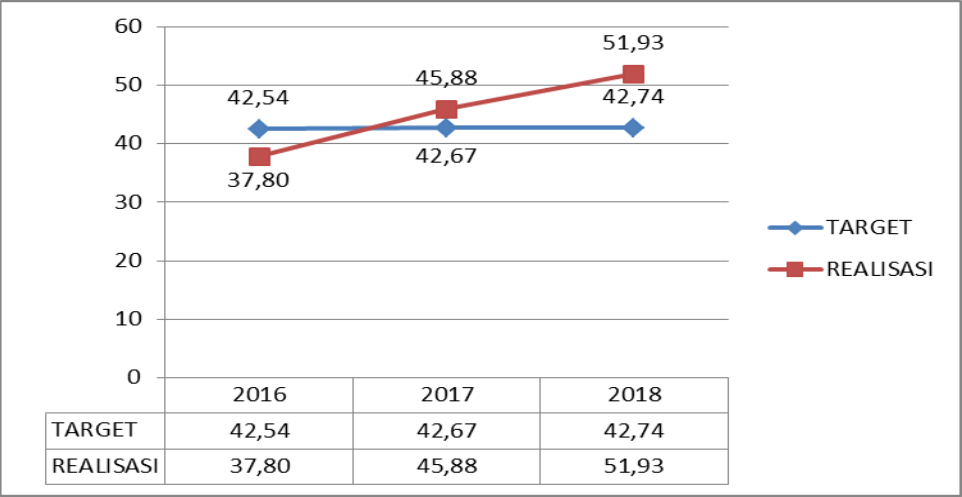
Capaian indicator Cakupan Pelayanan Sampah sebagaimana tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Target. Akhir RPJ-MD	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
1	Cakupan pelayanan sampah	%	42,74	51,93	121,50	42,94	120,94

Rincian realisasi kinerja cakupan pelayanan sampah tahun 2018 berdasarkan wilayah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah produksi sampah (M3)	Jumlah sampah tertanga ni (M3)	%
1	Prembun	13	20.992	-	0,00
2	Kutowinangun	19	33.624	-	0,00
3	Kebumen	24	96.847	77.987	80,53
4	Gombong	7	37.753	34.355	91,00
5	Karanganyar	75	27.140	-	0,00
	Jumlah		216.356	112.342	51,93

Perbandingan capaian indicator kinerja tahun 2018 dan tahun sebelumnya sebagaimana grafik berikut :



Dari data tersebut di atas, bahwa capaian kinerja cakupan pelayanan sampah dapat tercapai sesuai dengan target, hal tersebut ditunjang dengan semakin meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama penambahan armada, peningkatan fasilitas TPA dan penambahan rute angkutan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja cakupan pelayanan sampah terutama produksi sampah semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, di samping kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pengelolaan sampah yang benar (budaya buang sampah sembarangan, pengolahan sampah rumah tangga masih terbatas).

Upaya yang dilakukan di samping dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pemberdayaan bank sampah di tingkat desa/kelurahan, mengoptimalkan fungsi TPS3R, dan pengolahan sampah rumah tangga).

Program untuk mendukung indikator ini yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan anggaran Rp. 8.960.000.000 dan realisasi Rp. 7.986.984.819 (89,14%). Dalam hal ini terdapat penghematan penggunaan anggaran sebesar 10,86%, berasal dari efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

2. Sasaran 3 : “Meningkatnya keberdayaan masyarakat”.

Sasaran ke-3 dengan indikator sasaran : Cakupan rumah layak huni.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat

Berdasarkan Database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni (unit)}}{\text{Jumlah rumah (unit)}} \times 100\%$$

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Target. Akhir RPJ-MD	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
1	Cakupan rumah layak huni	%	97,66	97,67	100,01	100,00	97,67

NO.	KONDISI RUMAH	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Rumah	306.885	306.885	306.885	306.885
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	26.860	24.390	18.876	13.271
3	Penanganan RTLH	2.470	5.514	5.605	6.106
4	Jumlah rumah layak huni	282.495	288.009	293.614	299.720
5	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	91,25	93,85	95,68	97,67

	2016	2017	2018
TARGET	92,86	95,26	97,66
REALISASI	93,85	95,68	97,67

39

sudah tertangani sejumlah 19.695 unit, sehingga masih tersisa 7.165 unit yang harus diselesaikan pada tahun 2019.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan RTLH terutama terkait dengan pembiayaan, dimana anggaran yang disalurkan oleh pemerintah merupakan dana stimulan, sehingga sangat diperlukan dukungan berupa swadaya masyarakat.

Upaya yang dilakukan dengan mengupayakan dukungan anggaran untuk penanganan RTLH dari berbagai sumber, di samping dari APBD Kabupaten, juga APBD Provinsi, APBN, DAK, APBDes maupun sumber pendanaan lainnya.

Program untuk menunjang indikator ini yaitu program pengembangan perumahan dengan anggaran Rp. 1.328.710.000 yang dialokasikan untuk fasilitasi dan operasional penanganan RTLH. Realisasinya sebesar Rp. 1.256.881.557 (94,59%). Dalam hal ini terdapat penghematan penggunaan anggaran sebesar 5,41% berasal dari efisiensi belanja barang/jasa.

Alokasi anggaran untuk fisik pemugaran RTLH tahun 2018 bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen (BTL) sebesar Rp.22.670.000.000,-, untuk 2.267 unit, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 10.453.070.000 untuk 633 unit, APBD Provinsi Rp. 9.220.000.000 untuk 922 unit. Sedangkan penanganan lainnya berasal dari APBN (BSPS) untuk 379 unit, Baznas 56 unit, CSR 5 unit dan APBDes 1.844 unit.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

1. Evaluasi Kinerja.

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan evaluasi secara berkala dalam rapat-rapat melalui :

- Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan/ Kegiatan (triwulanan), untuk triwulan 1 dilaksanakan pada bulan April 2018, triwulan 2 pada bulan Agustus 2018, triwulan 3 pada bulan Oktober 2018 dan untuk triwulan 4 pada awal Desember 2018.
- Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan rencana kerja secara triwulanan, untuk triwulan 1 dilaksanakan pada bulan April 2018, triwulan 2 pada bulan Agustus 2018, triwulan 3 pada

bulan Oktober 2018 dan untuk triwulan 4 pada awal Januari 2019.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) indikator tersebut, menunjukkan bahwa 5 (lima) indikator dapat tercapai sesuai target, 2 (dua) indikator belum dapat tercapai sesuai target. Prosentase capaian untuk sasaran 1 dengan 1 (satu) indikator 28,60% (kategori “Kurang”), untuk sasaran 2 dengan 5 (lima) indikator rata-rata capaian 106,93% (kategori “Baik Sekali”), sedangkan untuk sasaran 3 dengan 1 (satu) indikator dengan prosentase capaian 100,01 (kategori “Baik Sekali”), dengan rincian :

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PENCAPAIAN INDIKATOR			
		BS	B	C	K
1	1	-	-	-	1
2	5	4	1	-	-
3	1	1	-	-	-

2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah.

2.1.1.Indiator : Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 50% baru dicapai 14,30% (% capaian 28,60% atau kategori “Kurang”).

2.2. Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2.2.1.Indikator 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator ini sudah dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 69,00 realisasi 72,25% (% capaian 104,71% atau kategori “Baik Sekali”).

2.2.2.Indikator 2 : Capaian Luas RTH Perkotaan.

Indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 16,93% realisasi 17,18 (% capaian 101,48% atau kategori “Baik Sekali”).

2.2.3.Indikator 3 : Indeks Kualitas Udara.

Indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target, dari target 77% realisasi dicapai 87,83% (% capaian 114,06% atau kategori “Baik Sekali”).

2.2.4. Indikator 4 : Indeks Kualitas Air.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 61% baru dicapai 56,67% (% capaian 92,90% atau kategori “Baik”).

2.2.5. Indikator 5 : Cakupan Pelayanan Sampah.

Indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 42,74% realisasi 51,93% (% capaian 28,60% atau kategori “Kurang”).

2.3. Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

2.3.1. Indikator : Cakupan Rumah Layak Huni.

Indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 97,66% realisasi 97,67% (% capaian 100,01% atau kategori “Baik Sekali”).

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN.

Dari total anggaran sebesar Rp. 48.939.459.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.114.234.593,- (88,10%), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	9.068.473.000	8.881.674.843	97,94
2	Belanja Langsung	39.870.986.000	34.232.559.750	85,86
	Total	48.939.459.000	43.114.234.593	88,10

Rincian realisasi anggaran per program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Belanja/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Rp	Rp	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.068.473.000	8.881.674.843	97,94
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.377.014.000	6.335.398.918	99,35
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.661.686.000	2.529.283.925	95,03
	Insentif Pemungutan			

No.	Belanja/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Rp	Rp	
3	Retribusi Daerah	29.773.000	16.992.000	57,07
	BELANJA LANGSUNG	39.870.986.000	34.232.559.750	85,86
I.	Program Pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.980.000	2.979.000	99,97
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000	56.777.977	81,11
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	143.237.000	142.394.432	99,41
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.000.000	39.981.000	99,95
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000	9.986.950	99,87
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.726.000	11.726.000	100,00
7	Penyediaan alat tulis kantor	33.000.000	32.998.700	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.395.000	27.386.400	99,97
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.411.000	8.448.000	68,07
11	Penyediaan makanan dan minuman	41.695.000	41.637.200	99,86
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	53.900.000	51.545.458	95,63
13	Penunjang Administrasi Perkantoran	573.343.000	531.222.825	92,65
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	65.000.000	52.945.000	81,45
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000	49.398.000	98,80
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	48.000.000	46.504.000	96,88
17	Pengadaan mebeleur	22.000.000	22.000.000	100,00
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	36.000.000	34.590.800	96,09
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	129.000.000	125.868.305	97,57

No.	Belanja/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Rp	Rp	
	kantor			
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.500.000	7.457.500	99,43
III.	Program Pengembangan Data/Informasi			
21	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	67.000.000	62.908.400	93,89
IV.	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah			
22	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	14.000.000	12.569.800	89,78
23	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	8.960.000.000	7.986.984.819	89,14
V.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
24	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	4.569.246.000	4.011.895.885	87,80
25	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	100.000.000	86.329.788	86,33
26	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1.539.000.000	1.362.715.594	88,55
VI.	Program Pengembangan Perumahan			
27	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1.328.710.000	1.256.881.557	94,59
28	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah sederhana sehat	418.000.000	393.945.050	94,25
VII.	Program Lingkungan Sehat Perumahan			
29	Penanganan kawasan kumuh perkotaan	3.477.382.000	2.883.061.698	82,91
VIII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
30	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	203.365.000	191.773.080	94,30

No.	Belanja/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Rp	Rp	
31	Pemantauan Kualitas Lingkungan	330.000.000	326.782.117	99,02
32	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	105.000.000	104.907.455	99,91
33	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	60.000.000	59.370.251	98,95
34	Pengkajian dampak lingkungan	90.000.000	88.501.021	98,33
35	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	150.000.000	74.853.500	49,90
36	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	300.000.000	296.971.075	98,99
37	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	200.000.000	196.047.125	98,02
38	Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)	125.000.000	119.309.066	95,45
IX	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam			
39	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	100.000.000	83.495.600	83,50
X	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam			
40	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	2.500.000.000	2.258.579.589	90,34
XI	Program peningkatan kualitas dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup			
41	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	60.000.000	52.847.796	88,08
42	Pengembangan data dan informasi lingkungan	40.000.000	39.473.825	98,68
43	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	200.000.000	196.586.300	98,29
XII	Program pengelolaan areal pemakaman			
44	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan	60.000.000	47.072.500	78,45

No.	Belanja/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Rp	Rp	
	areal pemakaman			
45	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1.000.000.000	875.696.681	87,57
46	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	100.000.000	79.639.750	79,64
XIII	Program peningkatan pengendalian polusi			
47	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	1.594.000	1.593.450	99,97
48	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	70.000.000	69.327.559	99,04
XIV	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
49	Penyusunan program pengembangan RTH	100.000.000	89.642.050	89,64
50	Penataan RTH	6.545.502.000	4.797.419.121	73,29
51	Pemeliharaan RTH	3.565.000.000	2.975.158.890	83,45
XV	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			
52	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	2.050.000.000	1.801.003.426	87,85
53	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Limbah	60.000.000	48.368.385	80,61
	TOTAL	48.939.459.000	43.114.234.593	88,10

Dalam hal ini terdapat penghematan masing-masing untuk belanja tidak langsung terdapat penghematan sebesar 12,06%., sedangkan untuk belanja langsung penghematan sebesar 14,14% berasal dari efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

Realisasi anggaran yang bersumber dari DAK tahun 2018, yang menunjang capaian kinerja sebagaimana tabel sebagai berikut:

No.	Bidang	Anggaran	Realisasi	%
1	Perumahan	10.453.070.000	9.508.945.050	90,97
2	Sanitasi	6.629.000.000	6.629.000.000	100,00
3	Lingkungan Hidup	834.000.000	832.327.000	99,80
		17.916.070.000	16.970.272.050	94,72

Untuk anggaran yang bersumber dari DAK terdapat penghematan belanja sebesar 5,28% berasal dari efisiensi belanja pengadaan barang/jasa dan adanya calon penerima manfaat DAK Perumahan yang mengalami permasalahan dalam hal ketidaksiapan swadaya.

D. INOVASI YANG DILAKSANAKAN.

1. GASEBO merupakan program gotong-royong membuat lubang resapan biopori (LRB) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen, BUMN, BUMD, DANDIM, POLRES dan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kebumen. LRB merupakan lubang yang dibuat dalam tanah yang berfungsi sebagai sarana untuk penyerapan air hujan ke dalam tanah dan sebagai sarana pembuatan kompos dari sampah organik secara alamiah. Tujuan utamanya adalah mengurangi genangan air di musim hujan (banjir) dan menabung air tanah untuk musim kemarau. LRB adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
2. GASPOL (biogas pengolah limbah) adalah program aplikasi pembuatan biogas dari limbah yang dihasilkan berbagai sektor seperti peternakan (sapi), industri dan rumah tangga. Gaspol diharapkan mampu mengurangi beban pencemaran sekaligus meningkatkan nilai limbah dengan pemanfaatan gas metan yang dihasilkan. Sejalan dengan hal tersebut, upaya ini juga merupakan salah satu upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Manfaat dari sisi ekonomi sebagai upaya efisiensi penggunaan energi berbahan bakar fosil dan alternatif penyediaan energi terbarukan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) indikator tersebut, menunjukkan bahwa 5 (lima) indikator dapat tercapai sesuai target, 2 (dua) indikator belum dapat tercapai sesuai target. Prosentase capaian untuk sasaran 1 dengan 1 (satu) indikator sebesar 28,66% (kategori “Kurang”), untuk sasaran 2 dengan 5 (lima) indikator rata-rata capaian sebesar 106,93% (kategori “Baik Sekali”), dan 1 (satu) indikator tidak tercapai yaitu “Indeks Kualitas Air”, dengan nilai “Baik”. Sedangkan untuk sasaran 3 dengan 1 (satu) indikator dengan prosentase capaian sebesar 100,01 (kategori “Baik Sekali”).

SASARAN	JUMLAH	PENCAPAIAN INDIKATOR			
	INDIKATOR	BS	B	C	K
1	1	-	-	-	1
2	5	4	1	-	-
3	1	1	-	-	-

Faktor penghambat 2 (dua) indikator yang belum tercapai :

1. Penanganan kawasan kumuh seluas 213,622 Ha, memerlukan anggaran relatif besar yang dibagi berdasarkan kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah

provinsi dan pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2018 dari 213,622 Ha baru tertangani 30,61 ha (14,33%), dimana alokasi anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat belum sesuai dengan rencana. Di samping itu, untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah desa masih terkendala dengan permasalahan asset.

2. Kendala capaian indeks kualitas air, terutama disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestic disebabkan budaya BAB sembarangan serta oleh limbah industry.

B. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja terutama untuk indicator kinerja yang belum sesuai dengan target yaitu indicator “prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan” dan “ indeks kualitas air”, tidak lanjut berupa :

1. Perencanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya dengan melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangannya.
2. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan pelayanan pengolahan air limbah domestic, serta kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama pencemaran air.
3. Mengefektifkan pelaksanaan system pengendalian intern melalui rapat-rapat koordinasi dan evaluasi dengan materi pencapaian indicator kinerja utama perangkat daerah.

C. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH.

Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja di bidang lingkungan hidup yang telah dicapai pada tahun 2018, telah diberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa “Sertifikat Adipura” dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kebumen, 23 Januari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN

H. EDI Rianto, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19701101 199803 1 006